



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR *114* TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk tertibnya pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Desa adalah, desa-desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Bantuan keuangan kepada Desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
8. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa

untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya BKK adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja perangkat desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN SASARAN BKK

Bagian Kesatu

Pengalokasian BKK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan BKK pada belanja bantuan keuangan dalam APBD untuk masing-masing desa.
- (2) Penerimaan BKK dalam APBDes dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembelanjaan dana BKK tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) yang ditentukan dalam APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian BKK untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah Kepala Dusun masing-masing desa yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Besaran Alokasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sasaran BKK

Pasal 5

Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan BKK adalah pengadaan kendaraan dinas untuk Kepala Dusun.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BKK

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran BKK

Pasal 6

- (1) Penyaluran BKK dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali setiap tahun selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) dilakukan dengan cara Pemindah bukuan dari RKUD ke RKD, setelah desa menyampaikan dokumen kontrak pengadaan kendaraan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah.

Bagian Kedua
Penggunaan BKK

Pasal 7

- (1) Penggunaan BKK adalah untuk pengadaan kendaraan dinas bagi Kepala Dusun.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan jenis/model sepeda motor roda 2 (dua).
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan spesifikasi kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengadaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa.
- (5) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi aset milik Desa.
- (6) Pemanfaatan aset milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

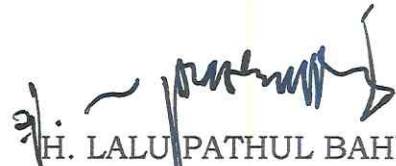
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal, 30 Desember 2021
BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :

Tanggal :

Tentang : PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

NO	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH KENDARAAN	JUMLAH (Rp)
I	PRAYA		
1	Mertak Tombok	3 unit	60,000,000
2	Aik Mual	3 unit	60,000,000
3	Montong Terep	5 unit	100,000,000
4	Jago	6 unit	120,000,000
5	Bunut Baok	6 unit	120,000,000
6	Mekar Damai	5 unit	100,000,000
II	JONGGAT		
1	Barejulat	4 unit	80,000,000
2	Ubung	5 unit	100,000,000
3	Jelantik	5 unit	100,000,000
4	Labulia	3 unit	60,000,000
5	Batu Tulis	2 unit	40,000,000
6	Perina	2 unit	40,000,000
7	Pengenjek	6 unit	120,000,000
8	Puyung	5 unit	100,000,000
9	Nyerot	2 unit	40,000,000
10	Sukarara	3 unit	60,000,000
11	Gemel	3 unit	60,000,000
12	Bonjeruk	5 unit	100,000,000
13	Bunkate	2 unit	40,000,000
III	BATUKLIANG		
1	Bujak	6 unit	120,000,000
2	Selebung	5 unit	100,000,000
3	Peresak	5 unit	100,000,000
4	Mantang	7 unit	140,000,000
5	Aik Darek	4 unit	80,000,000
6	Tampak Siring	4 unit	80,000,000
7	Barabali	8 unit	160,000,000
8	Beber	6 unit	120,000,000
9	Pagutan	5 unit	100,000,000
10	Mekar Bersatu	2 unit	40,000,000
IV	PUJUT		
1	Sengkol	7 unit	140,000,000
2	Segala Anyar	4 unit	80,000,000
3	Sukadana	6 unit	120,000,000
4	Teruwai	6 unit	120,000,000
5	Pengengat	6 unit	120,000,000
6	Kawo	6 unit	120,000,000
7	Gapura	3 unit	60,000,000
8	Rembitan	7 unit	140,000,000
9	Kuta	7 unit	140,000,000
10	Pengembur	8 unit	160,000,000
11	Tumpak	6 unit	120,000,000
12	Mertak	8 unit	160,000,000
13	Prabu	3 unit	60,000,000
14	Tanak Awu	5 unit	100,000,000
15	Ketara	5 unit	100,000,000
16	Bangket Parak	6 unit	120,000,000

NO	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH KENDARAAN	JUMLAH (Rp)
V	PRAYA BARAT		
1	Bonder	7 unit	140,000,000
2	Banyu Urip	3 unit	60,000,000
3	Mangkung	7 unit	140,000,000
4	Kateng	6 unit	120,000,000
5	Setanggor	5 unit	100,000,000
6	Penujak	6 unit	120,000,000
7	Selong Blanak	4 unit	80,000,000
8	Mekar Sari	3 unit	60,000,000
9	Batujai	6 unit	120,000,000
10	Tanak Rarang	2 unit	40,000,000
VI	PRAYA TIMUR		
1	Sukaraja	3 unit	60,000,000
2	Beleka	9 unit	180,000,000
3	Semoyang	7 unit	140,000,000
4	Mujur	7 unit	140,000,000
5	Landah	5 unit	100,000,000
6	Sengkerang	7 unit	140,000,000
7	Bilelando	3 unit	60,000,000
8	Ganti	8 unit	160,000,000
9	Marong	5 unit	100,000,000
10	Kidang	7 unit	140,000,000
VII	JANAPRIA		
1	Lekor	11 unit	220,000,000
2	Langko	4 unit	80,000,000
3	Janapria	8 unit	160,000,000
4	Loang Maka	8 unit	160,000,000
5	Saba	8 unit	160,000,000
6	Bakan	5 unit	100,000,000
7	Durian	3 unit	60,000,000
8	Pendem	7 unit	140,000,000
9	Selebung Rembiga	4 unit	80,000,000
10	Kerembong	8 unit	160,000,000
11	Jango	5 unit	100,000,000
12	Setuta	4 unit	80,000,000
VIII	PRINGGARATA		
1	Pringgarata	5 unit	100,000,000
2	Sepakek	4 unit	80,000,000
3	Murbaya	2 unit	40,000,000
4	Bagu	4 unit	80,000,000
5	Sintung	4 unit	80,000,000
6	Bilebante	3 unit	60,000,000
7	Pemepek	5 unit	100,000,000
8	Menemeng	3 unit	60,000,000
9	Arjanka	3 unit	60,000,000
10	Taman Indah	3 unit	60,000,000
11	Sisik	3 unit	60,000,000
IX	KOPANG		
1	Lendang Are	2 unit	40,000,000
2	Monggas	2 unit	40,000,000
3	Muncan	3 unit	60,000,000
4	Bebuak	5 unit	100,000,000
5	Kopang Rembiga	6 unit	120,000,000
6	Dasan Baru	5 unit	100,000,000
7	Montong Gamang	6 unit	120,000,000
8	Darmaji	3 unit	60,000,000
9	Wajageseng	4 unit	80,000,000
10	Aik Bual	2 unit	40,000,000
11	Semparu	2 unit	40,000,000

NO	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH KENDARAAN	JUMLAH (Rp)
X	PRAYA TENGAH		
1	Jurang Jaler	2 unit	40,000,000
2	Beraim	6 unit	120,000,000
3	Batunyala	4 unit	80,000,000
4	Lajut	3 unit	60,000,000
5	Pengadang	6 unit	120,000,000
6	Kelebu	6 unit	120,000,000
7	Pejanggik	5 unit	100,000,000
8	Dakung	3 unit	60,000,000
9	Prai Meke	3 unit	60,000,000
XI	PRAYA BARAT DAYA		
1	Montong Sapah	5 unit	100,000,000
2	Ungga	2 unit	40,000,000
3	Kabul	4 unit	80,000,000
4	Pelambik	6 unit	120,000,000
5	Darek	4 unit	80,000,000
6	Ranggagata	3 unit	60,000,000
7	Pandan Indah	4 unit	80,000,000
8	Serage	3 unit	60,000,000
9	Montong Ajan	6 unit	120,000,000
10	Batu Jangkik	6 unit	120,000,000
11	Teduh	2 unit	40,000,000
XII	BATUKLIANG UTARA		
1	Lantan	3 unit	60,000,000
2	Setiling	4 unit	80,000,000
3	Tanak Beak	4 unit	80,000,000
4	Aik Bukaq	4 unit	80,000,000
5	Teratak	4 unit	80,000,000
6	Aik Berik	5 unit	100,000,000
7	Mas-mas	4 unit	80,000,000
8	Karang Sidemen	5 unit	100,000,000
JUMLAH		600 unit	12,000,000,000

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH, 4

2/ H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

SPESIFIKASI KENDARAAN

Type Kendaraan	Manual		
Spesifikasi	1. Type Mesin	:	4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal
	2. Volume Langkah	:	110 cc s/d 125 cc
	3. Pola Perpindahan Gigi	:	N-1-2-3-4-N
	4. Transmisi	:	4 Speed, Rotary
	5. Rem Belakang	:	Cakram Hidrolik Piston Tunggal (CW)

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI